

MENGATASI KRISIS KEPRESIDENAN

Sofian Effendi

Kita semua sudah mengetahui bahwa pada 30 April 2001, dengan perbandingan suara 363 anggota setuju, 52 menolak dan 42 abstain, DPR telah mengeluarkan Memorandum II kepada Presiden. Dengan keluarnya Memo II tersebut jalan menuju Sidang Istimewa MPR sudah semakin nyata. Sejak itu, krisis demi krisis terus terjadi, dan pada Sidang Paripurna tanggal 30 April nanti, dipastikan Memorandum II akan dikeluarkan, dan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden tidak dapat dielakkan lagi. Kalau pada Sidang Istimewa tersebut pertanggungjawaban Presiden ditolak oleh 351 anggota MPR, maka mandat kepada Presiden Gus Dur akan dicabut dan kemungkinan ini nampaknya sudah di depan mata.

Pukulan telak terhadap Presiden Gus Dur pada 1 Februari 2001 merupakan kulminasi dari ketegangan hubungan antara Presiden dan DPR. Pada awalnya, pemerintahan Gus Dur memiliki legitimasi yang amat tinggi, karena dipandang sebagai pemerintahan yang demokratis, mampu mengayomi berbagai kelompok dan golongan, serta mampu mengatasi krisis ekonomi dan sosial yang sedang mengancam negara dan bangsa. Pendek kata, Pemerintah Gus Dur dipandang merupakan sosok pemerintahan yang amat berbeda dari Pemerintah Orde Baru yang telah memerintah Indonesia dengan otoritas sepenuhnya berada di tangan Presiden Soeharto yang didukung oleh militer dan birokrasi sipil. Pemerintah yang mendapat dukungan yang amat kuat pada awalnya, ternyata tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi bangsa. Bahkan, *economic recovery* yang dicapai selama Pemerintahan Habibie tidak berhasil dipertahankan, apalagi ditingkatkan menjadi *economic revival*. Korupsi di lingkungan pemerintah masih belum berhasil diberantas, bahkan semakin menyebar sampai ke lingkungan yang terdekat dengan Presiden. Konflik etnis dan antar agama masih saja terjadi, dan gerakan separatis di Irian Jaya dan Aceh belum teratasi dan belum ada tanda-tanda akan mereda.

Ketidak mampuan pemerintah mengatasi berbagai masalah nasional ini telah menimbulkan kekhawatiran yang besar pada berbagai kalangan masyarakat terhadap nasib bangsa dan negara. Dan kekhawatiran inilah yang menjadi sebab utama tuntutan agar Gus Dur mundur sebagai Presiden. Selain karena kegagalan Pemerintah, tuntutan masyarakat yang semakin kuat setiap hari

juga tidak terlepas dari kebiasaan Gus Dur yang senang menebar isu dan komentar yang mengobarkan api pada para pendukungnya. Sudah menjadi kebiasaan Gus Dur untuk menggunakan Pasca Ibadah Sholat Jum'at sebagai forum menebar isu yang memanaskan suasana. Pernyataan-pernyataan membakar yang disampaikan oleh Gus Dur di berbagai kesempatan di Jawa Timur, Serang dan Kendal dalam minggu-minggu terakhir menjelang Sidang Paripurna DPR, mendorong seorang komentator politik untuk menyimpulkan bahwa Presiden R.I. bukan lagi seorang Bapak pemersatu bangsa tetapi telah merosot menjadi provokator politik.

Sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa krisis hubungan antara Presiden dan DPR akan segera berahir. Bahkan, melihat eskalasi perkembangan politik nasional seminggu terakhir, bahkan ada tanda-tanda bahwa krisis tersebut akan memuncak menuju ke tindak kekerasan yang akan mengakibatkan pertumpahan darah.

Setelah melakukan pertemuan maraton di Jakarta, Denpasar dan di Jakarta, 7 Fraksi DPR nampaknya telah mencapai konsensus tentang cara untuk mengatasi krisis nasional yang amat pelik ini. Kalau kesepakatan yang dicapai di Denpasar dan di Jakarta dapat dipertahankan, Sidang Paripurna DPR tgl 30 April 2001 akan mengeluarkan Memorandum II atau mengusulkan agar MPR segera menggelar Sidang Istimewa. Memang ada resiko bahwa menjelang Sidang Paripurna DPR tersebut, lebih-lebih menjelang Sidang Istimewa MPR, para pendukung Gus Dur akan menggerakkan kekuatannya ke Jakarta untuk memberikan "tekanan politik" yang kuat kepada kelompok-kelompok yang dipandang sebagai "musuh" Gus Dur. Para pendukung ini akan datang dari daerah basis pendukung kuat Gus Dur di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah, yang kemungkinan akan melakukan cara-cara inkonstitusional dalam mengekspresikan dukungan mereka kepada Gus Dur. Apa yang terjadi bila kekuatan-kekuatan politik yang bertentangan ini saling tidak mau mengalah?

Tulisan ini secara singkat mencoba menganalisis skenario yang mungkin terjadi setelah keluarnya Memo II dan Sidang Istimewa MPR, untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi serta outcomes dari krisis nasional yang sedang berlangsung, khususnya bahaya besar yang akan dihadapi bangsa bila timbul kekerasan antara kekuatan Pro Gus Dur dan kekuatan Kontra Gus Dur.

Kemungkinan *Outcomes*: Empat Skenario

Melihat komposisi kekuatan-kekuatan politik di DPR dan MPR, nampaknya nasib Presiden Gus Dur saebulan kedepan akan amat ditentukan oleh 5 blok partai di DPR dan MPR yakni PDIP, Golkar, Poros Tengah, TNI-Polri dan PKB. Dipastikan PKB akan mendukung Gus Dur sampai tetes darah terakhir. PDIP, Golkar dan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, mungkin sudah sampai pada *point-of-no-return* dan akan mengambil sikap yang tegas terhadap Gus Dur. Fraksi TNI-Polri, dengan 38 anggota, akan mengambil sikap “yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara”. Sikap-sikap ini lah yang akan menentukan nasib Presiden Gus Dur pada Sidang Istimewa MPR.

Golkar dengan 182 kursi di MPR dan PDI-P dengan 185 kursi di MPR merupakan dua kekuatan yang amat menentukan. Sikap kedua partai ini semakin terbaca setelah Pidato televisi Presiden Gus Dur telah menimbulkan respons negatif dari kalangan DPR. Dalam pidato tersebut ada terselip nada menyamakan DPR dengan Konstituante dalam hal banyaknya tunggakan RUU. Kalau kalimat itu hanya sekedar sindiran “He, bukan saya saja yang kinerjanya rendah, tetapi kalian juga”, mungkin implikasinya terhadap kehidupan politik Indonesia tidak akan terlalu besar. Tetapi kalau dalam kalimat tersebut terselip pesan bahwa “Saya akan gunakan Solusi Sukarno terhadap Konstituante untuk memecahkan masalah yang sama” maka sebagai bangsa kita sedang menghadapi ancaman besar dan serius terhadap kehidupan demokrasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut 367 kursi di MPR akan sangat menentukan masa depan Presiden.

Dukungan Fraksi TNI-Polri terhadap Memorandum I, menunjukkan bahwa netralitas yang dipertahankan oleh Fraksi tersebut juga mungkin akan berubah. Bila dua partai besar, PDIP dan Golkar, mengusulkan untuk menindaklanjuti Memorandum II dengan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, kemungkinan besar Fraksi TNI-Polri tidak lagi mengambil sikap senetral seperti pada Sidang Paripurna DPR pada 30 April 2001.

Menurut perkiraan, kemungkinan *outcomes* dari Sidang Paripurna DPR satu bulan setelah Memo II adalah sebagai berikut:

Skenario I DPR menolak jawaban Presiden terhadap Memo II, dan mengusulkan agar diadakan Sidang Istimewa MPR untuk meminta

pertanggungjawaban Presiden. Sesuai Tap MPR No. III/ BP-MPR Sidang Istimewa tersebut akan diselenggarakan pada ahir Juli atau awal Agustus 2001, karena diperlukan waktu persiapan 2 bulan. Setelah mengamati dengan cermat dan penuh kebijaksanaan perkembangan keadaan menjelang Sidang Istimewa MPR, ada kemungkinan Presiden Gus Dur berkeputusan untuk mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Pengunduran diri Gus Dur secara legowo dan dengan jiwa besar ini diperkirakan akan dapat diterima oleh para pendukungnya dan merupakan solusi yang paling baik untuk menghindari konflik horizontal antara kedua kubu. Dengan demikian, secara konstitusional, berdasarkan pasal 8 UUD 1945, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri akan dilantik sebagai Presiden RI ke V sampai ahir masa bakti. Solusi ini nampaknya yang paling diharapkan oleh Wapres, karena tidak mau memikul beban moral dituduh sebagai Wapres yang melakukan kudeta terhadap Presiden. Menurut orang-orang yang kenal dekat dengan Gus Dur Skenario I ini very unlikely.

Skenario II DPR menolak jawaban Presiden terhadap Memo II lalu diselenggarakan Sidang Istimewa MPR. Setelah pertanggung-jawaban Presiden ditolak oleh mayoritas anggota MPR, mandat Gus Dur sebagai Presiden dicabut. Sesuai ketetapan konsitusi Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden ke V Republik Indonesia. Pemerintah Megawati Sukarnoputri memiliki legitimasi yang cukup kuat karena didukung oleh semua fraksi kecuali FKB. Agar kesalahan pada pemilihan Gus Dur tidak terulang kembali, pengangkatan Megawati harus diikat dengan suatu perjanjian tertulis yang antara lain mencantumkan tugas pemerintah tersebut adalah: (1) mengatasi krisis ekonomi dan mengembalikan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia; (2) menyelesaikan masalah Aceh dan Irian Jaya dalam rangka mempertahankan kesatuan bangsa dan negara; (3) meneruskan agenda reformasi termasuk menyelenggarakan pemilihan Presiden secara langsung.

Skenario III Gus Dur berhasil meyakinkan para anggota DPR bahwa Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi berbagai krisis nasional dan karena itu DPR tidak meminta diadakan Sidang Istimewa. Kalau ini terjadi, proses demokrasi yang sedang bergulir dapat berjalan terus tanpa gangguan. Namun untuk menjamin agar pemerintahan Gus Dur tetap berjalan pada rel konstiotusional, kekurangmampuan Gus Dur dalam memimpin pemnerintahan diatasi. Sejalan dengan pemikiran DPA, salah satu cara untuk mengatasi kelemahan Gus Dur dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menunjuk Wakil Prepsiden sebagai

Penyelenggara Pemerintahan dan sebagai Pimpinan kabinet. Ini dapat dilakukan dengan mengokohkan Keppres No. 121 tahun 2000 menjadi Ketetapan MPR tentang Penetapan Wapres sebagai penyelenggara Pemerintahan dan Pemimpin Kabinet.

Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh Presiden seandainya beliau lolos dari jeratan Memo II dan Sidang Istimewa adalah menyatakan diri non-aktif karena alasan kesehatan. Dengan status non-aktif, secara formal Gus Dur tetap menjadi Presiden RI dengan segala fasilitas dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Presiden tetap dapat mengadakan kunjungan termasuk ke luar negeri dalam status sebagai kepala negara, tetapi tidak secara aktif memimpin kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Skenario IV Skenario doomsday. Setelah menyaksikan bahwa semua inisiatif untuk menyusun dukungan baru tidak mendapat tanggapan positif dari PDIP, Golkar dan Poros Tengah, dan secara salah Presiden menafsirkan bahwa sikap netral Fraksi TNI-Polri berarti dukungan tanpa reserve kepada Presiden, ada kemungkinan Gus Dur akan melakukan tindakan nekat menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan membubarkan DPR. Kabarnya, para ahli hukum ketatanegaraan yang berada disekitar Presiden mendukung gagasan Gus Dur tersebut. Kalau scenario doomsday ini yang terjadi, Indonesia akan kembali ke periode kehidupan politik yang gelap yang disebut Syahril periode Kalayuga.

Mempersiapkan Pemerintahan Yang Mantap

Scenario mana yang paling mungkin terjadi? Reportase Marianne Kearney di *Strait Times* beberapa hari yang lalu menunjukkan bahwa jumlah Barisan Berani Mati tidaklah sebanyak seperti yang diucapkan oleh Gus Dur di Serang (400.000 orang). Jumlah peserta latihan BBM di hutan-hutan Bayuwangi jumlahnya hanya ratusan orang, dan latihan perang gerilya yang dilakukan kualitasnya belum memadai. Semangat berani mati dan membela sampai titik darah terahir dari para peserta pun, menurut Kearney, tidaklah seperti yang diberitakan di media massa. Sebagian besar peserta lebih tertarik pada ilmu kebalnya daripada keinginan untuk membela Gus Dur sampai mati.

Kalau reportase Kearney ini benar adanya, tidak beralasan kekhawatiran berbagai pihak bahwa di Jakarta serta kota-kota lain akan terjadi kekacauan

besar dan pertumpahan darah. Pasukan keamanan yang telah disiagakan di Jakarta pasti akan dapat mengatasi tantangan tersebut dengan baik dan tepat.

Bila ancaman keamanan yang akan dihadapi tidak sebesar yang digembargemborkan dan sikap blok-blok politik yang besar tidak berubah, Skenario II adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Secara konstitusional Wapres Megawati Soekarnoputri akan diangkat sebagai Presiden ke V RI untuk membentuk suatu pemerintahan yang mampu menjamin ketenangan, memungkinkan penataan kembali sistem politik dan kepartaian nasional, serta memungkinkan pembangunan hubungan antar kelompok etnis dan umat beragama yang lebih harmonis.

Untuk menjaga agar skenario tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman sampai tahun 2004, langkah-langkah berikut perlu ditempuh oleh kekuatan-kekuatan yang mendukung skenario tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah:

1. Untuk membantu Presiden menjalankan tugas memimpin pemerintahan, Presiden mungkin perlu dibantu oleh seorang Wakil Presiden, yang akan dipilih oleh MPR. Alternatif lain, dapat juga jabatan Wakil Presiden tidak diisi, tetapi Presiden dibantu oleh suatu Kabinet Kerja (Zaken Kabinet) yang terdiri dari para teknokrat yang menguasai bidang pekerjaan masing-masing. Format kabinet kerja ini adalah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Untuk membantu Presiden menjalankan administrasi pemerintahan, Presiden dapat menunjuk 2-3 Menko yang akan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas bidang masing-masing.
2. Untuk menjamin stabilitas pemerintah transisi ini, perlu difikirkan adanya **Perjanjian Tertulis Koalisi PDIP-Golkar-Poros Tengah-TNI-Polri** yang mencantumkan kesepakatan-kesepakatan pokok yang tidak boleh dilanggar paling tidak sampai Pemilu selanjutnya. Koalisi secara tertulis ini pernah dilakukan di Jerman Barat, pada waktu pemerintahan minoritas dibawah Helmut Schmidt tidak memiliki dukungan yang cukup untuk membentuk sebuah pemerintah. Butir-butir yang perlu diatur dalam Perjanjian Tertulis tersebut antara lain adalah: (a) komposisi Kabinet; (b) Program Kerja; (c) Kesepakatan tentang susunan birokrasi, dll.

3. Pemerintah diselenggarakan dengan tugas melaksanakan Program Kerja berikut: (a) Menyelamatkan Indonesia dari Krisis Ekonomi; (b) Menjaga keutuhan persatuan bangsa dan negara; (c) Mengembalikan kepercayaan dunia internasional; (d) Mengatasi krisis politik termasuk mencegah kemungkinan tumbuhnya kembali PKI serta ajaran komunisme.

Krisis kepresidenan yang sedang kita alami sekarang ini sekali lagi menunjukkan kepada kita semua bahwa Republik Indonesia betul-betul memerlukan suatu Reformasi Konstitusional. UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki melalui amandemen UUD. Beberapa titik kelemahan konstitusional yang terkandung di dalamnya antara lain adalah: (a) konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada Presiden; (b) sistem pemerintahan yang tidak jelas; presidensiil atau parlementer; dan (c) hubungan antara lembaga tinggi negara. Kelemahan-kelemahan konstitusional ini perlu diperbaiki agar tercapai sistem pemerintahan R.I yang lebih mantap.

Jakarta, 23 April 2001